



## Pedagang di Jalan Perwakilan Minta Perpanjangan Waktu

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA – Kelompok pedagang di Jalan Perwakilan Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) meminta perpanjangan waktu kepada Pemda DIY. Perpanjangan waktu ini terkait dengan pengosongan kawasan jalan tersebut yang diminta oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Pemda DIY sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran agar pedagang mengosongkan kawasan tersebut per Desember 2022. Permintaan pengosongan ini dilakukan karena adanya rencana untuk membangun Jogja

Planning Gallery oleh Pemda DIY bersama Pemkot Yogyakarta.

Ketua FKKP, Adi Kusuma mengatakan, pihaknya tidak menolak pengosongan maupun pembangunan Jogja Planning Gallery. Namun, pihaknya berharap diberikan perpanjangan waktu oleh pemerintah untuk mengosongkan kawasan itu.

Setidaknya, kata Adi, pihaknya dapat diberikan waktu hingga 2024 mendatang. Jika waktu tersebut dinilai terlalu lama, minimal pihaknya dapat diberikan waktu hingga 15 hari setelah Idul Fitri 2023.

"Paling tidak hingga H+15 setelah perayaan Hari Idul Fitri tahun 2023 mendatang, dengan

kompensasi relokasi yang letaknya juga di sekitar Malioboro," kata Adi saat audiensi dengan DPRD DIY belum lama ini.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad meminta agar pemerintah mencari solusi terbaik terkait dengan permasalahan tersebut. Diharapkan agar pemerintah dalam hal ini Pemda DIY sebagai pemegang kebijakan dapat memberikan solusi yang tidak merugikan pedagang khususnya di kawasan Jalan Perwakilan.

"Saat kita membuat kebijakan, kalau saya di posisi (pedagang) itu seperti apa, mari kita berempati selayaknya kita seorang pedagang. Kami selalu sampaikan setiap kali rapat ber-

sama OPD, mari kita bersedekah kebijakan, sehingga apa yang kita putuskan nanti merupakan amal jariyah kita semua," kata Lilik.

Sementara itu, dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta yang ikut dalam audiensi itu juga tengah menunggu keputusan yang sedang direvisi. Sebab, hal ini perlu dikordinasikan dengan bersama dengan Pemda DIY yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan.

Perwakilan dari DPTR Kota Yogyakarta juga menyebut bahwa nantinya akan ada pertemuan dan komunikasi lanjutan antara pedagang dengan pemerintah. ■ **ed:** fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005